



Rancang Bangun Dan Implementasi *Executive Information System* Data Keagamaan Menggunakan Scrum Model

Muhammad Firdaus¹ Handoyo Widi Nugroho² Agus Rahardi³

^{2,3}Program Studi Sistem Informasi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya; Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Indonesia, telp. (0721) 787214/fax. (0721) 700261

¹Program Studi Magister Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya; Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Indonesia, telp. (0721) 787214/fax. (0721) 700261

e-mail: ¹firdaus131272.mf@gmail.com, ²handoyo.wn@ darmajaya.ac.id,
³agus.rahardi@ darmajaya.ac.id

Abstrak

Kementerian Agama memiliki visi untuk menjadi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Agama harus memiliki fasilitas yang memadai dalam rangka menjalankan proses bisnisnya, sedangkan dalam proses bisnis yang berjalan saat ini, Kementerian Agama Provinsi Lampung belum memiliki otomasi dan integrasi proses bisnis antar bagian atau unit kerja. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menggunakan perangkat komputer dalam kesehariannya pada masing-masing unit kerja, namun belum tersistem secara khusus dimana seluruh kegiatan belum terkoneksi atau terintegrasi antar bagian atau unit kerja. Selain itu, dokumen-dokumen dan data-data pada masing-masing unit kerja selama ini disimpan di perangkat personal computer (PC) yang digunakan oleh masing-masing staf pada masing-masing unit kerja, dan belum semua staf melakukan pencadangan data secara berkala ke media offline (hard disk eksternal). Hal tersebut tentu saja berisiko tinggi terhadap kerusakan dan kehilangan data serta memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam layanan yang diberikan. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Rancang Bangun dan Implementasi *Executive Information System* Data Keagamaan berbasis Web menggunakan Scrum Model pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Kata kunci— Analisa, scrum, sistem, teknologi dan informasi

Abstract

The Ministry of Religion has a vision to become a professional and reliable Ministry of Religion in building a pious, moderate, intelligent and superior society to realize an advanced Indonesia that is sovereign, independent, and has a personality based on mutual cooperation. To realize the vision and mission, the Ministry of Religion must have adequate facilities in order to carry out its business processes, while in the current business process, the Ministry of Religion of Lampung Province does not yet have automation and integration of business processes between sections or work units. The Provincial Office of the Ministry of Religion uses computer equipment in their daily activities in each work unit, but it has not been systemized specifically where all activities have not been connected or integrated between sections or work units. In addition, documents and data in each work unit have so far been stored on personal computers (PCs) used by each staff in each work unit, and not all staff have backed up data periodically to offline media (external hard disk). This, of course, carries a high risk of data damage and loss and allows for irregularities to occur in the services provided. Based on the background, researchers are interested in conducting research on the Design and Implementation of a Web-based Religious Data Executive Information System using the Scrum Model at the Regional Office of the Ministry of Religion of Lampung Province.

Keywords—Analysist, Scrum, system, technology, information

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama [1], yang kemudian diperjelas dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor SJ/ B.IV/ 2/ OT.00/ 296/ 2014 tanggal 4 Februari 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Kementerian Agama bertujuan agar mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi, data dan pelayanan dengan baik [2]. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia No. 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan dan Publikasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2020 [3]:

1. Bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Instansi Vertikal dalam menyelenggarakan

tugas dan fungsi memerlukan data dan informasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan;

2. bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, menghasilkan data yang dapat digunakan untuk evaluasi dan ukuran capaian kinerja;
3. bahwa data dan informasi harus diolah dan disajikan dalam bentuk statistik yang mampu menggambarkan capaian kinerja sekaligus bahan evaluasi dan dukungan perencanaan pada periode berikutnya;
4. bahwa untuk menghasilkan statistik berkualitas, diperlukan data berkualitas dan kemampuan mengolah data secara baik;
5. bahwa statistic harus disusun dalam bentuk Statistik Kantor Wilayah dan dipublikasikan agar dapat diketahui dan dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan internal dan eksternal; dan
6. bahwa dalam menyusun dan publikasi Statistik Kantor Wilayah, diperlukan norma, standar, pedoman, dan kriteria.

Data yang diolah dan disajikan dalam Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung dapat bersumber dari:

1. Sistem Elektronik, menjadi rujukan utama atas data yang diolah menjadi statistik, antara lain:
 - a. Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg);
 - b. Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat);
 - c. Education *Management Information System* (EMIS);
 - d. Sistem Informasi Kemasjidan (Simas);
 - e. Sistem Informasi Wakaf (Siwak);
 - f. Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah);
 - g. Sistem Informasi Penerangan Agama Islam (Simpenais).
2. Sistem Elektronik, aplikasi lainnya yang dikelola oleh Unit Eselon I dan/atau Kantor Wilayah untuk pengumpulan dan pengelolaan data mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Dokumen Administrasi, merupakan produk dokumen administrasi yang digunakan dan/atau dihasilkan oleh unit dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Survei, apabila terdapat statistik yang dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam
6. Bidang Hindu
7. Sub Bagian Umum dan Humas
8. Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara
9. Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum
10. Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi
11. Sub Bagian Ortala dan Kerukunan Umat Beragama (KUB)
12. Pembimas Kristen
13. Pembimas Katolik
14. Pembimas Budha

Agar pelaksanaan tugas pada masing-masing bidang tersebut dapat berjalan secara optimal maka perlu adanya aplikasi sistem informasi yang menjembatani antara bidang-bidang tersebut. Oleh karena itu, diperlukan adanya Rancang Bangun dan Implementasi *Executive Information System* (EIS) Data Keagamaan yang dapat dijadikan arah pengembangan teknologi informasi pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

Kementerian Agama memiliki visi untuk menjadi Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Kementerian Agama harus memiliki fasilitas yang memadai dalam rangka menjalankan proses bisnisnya, sedangkan dalam proses bisnis yang berjalan saat ini, Kementerian Agama Provinsi Lampung belum memiliki otomasi dan integrasi proses bisnis antar bagian atau unit kerja.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menggunakan perangkat komputer dalam kesehariannya pada masing-masing unit kerja, namun belum tersistem secara khusus dimana seluruh kegiatan belum terkoneksi atau terintegrasi antar bagian atau unit kerja. Selain itu, dokumen-dokumen dan data-data pada masing-masing unit kerja selama ini disimpan di perangkat *personal computer*

Data dan informasi yang disajikan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Tata Kelola dan Dukungan Manajemen
2. Pelayanan Keagamaan
3. Pelayanan Haji dan Umroh
4. Pendidikan Agama dan Keagamaan
5. Daftar Alamat

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Terdiri dari 6 Bidang, 5 Sub Bagian, dan 3 Pembimas yaitu:

1. Bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah
2. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf
3. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Bidang Pendidikan Madrasah

(PC) yang digunakan oleh masing-masing staf pada masing-masing unit kerja, dan belum semua staf melakukan pencadangan data secara berkala ke media offline (hard disk eksternal). Hal tersebut tentu saja berisiko tinggi terhadap kerusakan dan kehilangan data serta memungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam layanan yang diberikan.

Apabila ada layanan permintaan tentang data, maka disampaikan ke bidang-bidang, subbag-subbag atau pembimas-pembimas yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya. Kadang menemui kendala, operatornya tidak ditempat, gangguan jaringan, dan data belum terkini. Hal tersebut tentunya menyebabkan pelayanan menjadi terhambat dan mempengaruhi kepuasan pengguna layanan.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Rancang Bangun dan Implementasi Executive Information System Data Keagamaan berbasis Web menggunakan Scrum Model pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.

2. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Sebelum memasuki tahap selanjutnya yaitu implementasi sistem, maka peneliti melakukan pengumpulan data yang nantinya akan digunakan dalam merancang dan membangun sistem yang dibutuhkan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data untuk mendapatkan data primer dan informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang akan diteliti. Adapun metode pengumpulan data pada saat studi lapangan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan untuk lebih mempermudah dalam proses pengumpulan

data primer. Pengamatan secara langsung dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung pada Bidang Urusan Agama Islam dan Bimbingan Syariah menganalisa Sistem Informasi Nikah (SIMKAH), Sistem Informasi Masjid (SIMAS), Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf menganalisa Sistem Informasi Wakaf (SIWAK), Sistem Informasi Penais (SIMPENAI), Sub Bagian Kepegawaian dan Hukum menganalisa Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG), Bidan Hindu, Pembimas Kristen, Pembimas Katolik dan Pembimas Budha menganalisa permasalahan yang ada terkait informasi data keagamaan yang dibutuhkan terhitung bulan November 2021.

b. Wawancara

Dalam pengumpulan data dengan metode wawancara ini, penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada operator Simkah, Simas, Simpenais, Siwak dan Simpeg bagaimana cara kerja aplikasi yang digunakan, baik dalam penginputan maupun output yang dihasilkan. Wawancara juga diajukan terhadap Pimpinan dan Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung mengenai kebutuhan informasi data keagamaan.

3.1.2 Studi Pustaka

Peneliti melakukan studi literatur dengan menggunakan buku-buku, penelitian sebelumnya serta jurnal yang berhubungan dengan topik dan masalah dalam penelitian ini dengan cara membaca serta mengutip yang digunakan untuk mendukung proses penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan Executive Information System dengan menggunakan metode Scrum Model untuk memperoleh data sebagai bahan acuan yang akan digunakan penulis.

3.2 Metode Pengembangan Sistem

Adapun proses Rancang Bangun dan Implementasi Executive Information System Data Keagamaan berbasis Web adalah menggunakan Scrum Model. Scrum Model adalah metodologi pengembangan

perangkat lunak yang menerapkan siklus pendek berulang, secara aktif melibatkan pengguna untuk membangun, memprioritaskan, dan memverifikasi kebutuhan. Pengembangan sistem atau perangkat lunak menggunakan Scrum Model memiliki kelebihan dalam menghasilkan produk sesuai dengan keinginan pengguna. Dimana cocok untuk pengembangan sistem dan banyak perubahan. Berikut penerapan kerangka kerja *Scrum Model* pada Rancang Bangun dan Implementasi *Executive Information System* Data Keagamaan Berbasis Web Menggunakan *Scrum Model* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung yang penulis ajukan:

a. *Product Backlog*

Product Backlog merupakan proses pengumpulan kebutuhan yang dilakukan melalui daftar prioritas kebutuhan sistem. Proses pengerjaan yang dilakukan penulis pada tahapan *product backlog* yaitu melakukan menganalisa sistem yang sedang berjalan pada selama ini [4]. Proses pengumpulan kebutuhan tersebut dilakukan kepada pihak terkait yaitu Bidang-bidang, Pembimas-pembimas dan Sub Bagian-Sub Bagian di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan penulis adalah penyajian data informasi data keagamaan dilakukan dengan cara yang kurang efektif data yang disajikan tidak real time.

b. *Sprint Planning*

Pada tahap pengumpulan kebutuhan dalam *product backlog* yang menjadi daftar prioritas kebutuhan sistem maka perencanaan penjadwalan penelitian dan perencanaan perancangan sistem yang baru di lakukan pada tahap ini, setelah perencanaan sprint sudah selesai dibuat oleh penulis maka dapat melangkah ke tahap selanjutnya yaitu *sprint backlog* [5].

c. *Sprint Backlog*

Sprint backlog adalah proses pemenuhan kebutuhan sesuai yang direncanakan pada *product backlog* dan *sprint planning* yang telah ditentukan. Dari

hasil analisis penulis yang telah didapat maka kebutuhan sistem informasi dapat diketahui [6]. Dimana sistem informasi data keagamaan yang dibuat dengan tujuan utama yaitu memfasilitasi kebutuhan pimpinan maupun pihak eksternal akan informasi data keagamaan. Adapun data keagamaan yang akan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia No. 53 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan dan Publikasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2020. Data Pelayanan Keagamaan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pelayanan Keagamaan

BAB II. PELAYANAN KEAGAMAAN			
1.	Jumlah Penduduk menurut Agama	Sistem Elektronik Disdukcapil, Kemendagri	
2.	Jumlah Rumah Ibadah menurut Jenis Rumah Ibadah	Simas, Potensi Desa, BPS, Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Rumah Ibadah: 1. Masjid 2. Gereja Kristen 3. Gereja Katolik 4. Pura 5. Vihara Klenteng
3.	Jumlah Masjid menurut tipologi	Simas dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi tipologi Masjid: 1. Masjid Raya 2. Masjid Agung 3. Masjid Besar 4. Masjid Jami' 5. Masjid Bersejarah Masjid di Tempat Publik
4.	Jumlah Penyuluh Agama PNS Menurut Agama	Simpeg	Klasifikasi Agama: 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha Konghucu
5.	Jumlah Penyuluh Agama PNS agama Islam menurut jenis kelamin dan kualifikasi	Simpeg	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan

	pendidikan		Klasifikasi kualifikasi pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
6.	Jumlah Penyuluh Agama PNS agama Kristen menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Simpeg	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi kualifikasi pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
7.	Jumlah Penyuluh Agama PNS agama Katolik menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Simpeg	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi kualifikasi pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
8.	Jumlah Penyuluh Agama PNS agama Hindu menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Simpeg	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi kualifikasi pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
9.	Jumlah Penyuluh Agama PNS agama Budha menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Simpeg	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
10.	Jumlah Penyuluh Agama PNS agama Konghucu menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Simpeg	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi kualifikasi pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1

11.	Jumlah Penyuluh Agama Non PNS menurut Agama	Simpenais, System Elektronika dan/atau Dokumen Administrasi	
12.	Jumlah Penyuluhan Agama Islam Non PNS menurut jenis kelamin dan kualifikasi Pendidikan	Simpenais, Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
13.	Jumlah Penyuluh Agama Kristen Non PNS menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
14.	Jumlah Penyuluh Agama Katolik Non PNS menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 >S1
15.	Jumlah Penyuluh Agama Hindu Non PNS menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1
16.	Jumlah Penyuluh Agama Budha Non PNS menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki

			2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1			1. Baik 2. Rusak Ringan 3. Rusak Berat	
17.	Jumlah Penyuluh Agama Konghucu Non PNS menurut jenis kelamin dan kualifikasi pendidikan	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Jenis Kelamin: 1. Laki-laki 2. Perempuan Klasifikasi Kualifikasi Pendidikan: 1. <S1 2. S1 3. >S1	22	Jumlah Kantor Urusan Agama yang direhabilitasi	Dokumen Administrasi	
				23	Jumlah Balai Nikah	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	
				24	Jumlah Penghulu menurut tingkat jabatan	Simpeg	Klasifikasi tingkat jabatan: 1. Pertama 2. Muda 3. Madya
				25	Jumlah Penghulu yang mendapatkan pembinaan dari kanwil/kankemenag	Dokumen Administrasi	
18.	Jumlah Penyuluh Agama Non PNS penerima tunjangan menurut agama	Simpenais, Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi Agama: 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu	26	Jumlah peristiwa nikah menurut bulan	Simkah	Klasifikasi bulan: 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus 9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember
19	Jumlah sasaran bimbingan penyuluh agama menurut agama	Dokumen Administrasi	Klasifikasi Agama: 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu	27	Jumlah Buku Nikah dan Kartu Nikah yang diedarkan	Simkah dan/atau Dokumen Administrasi	
20	Jumlah Kantor Urusan Agama menurut Tipologi	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi tipologi KUA: 1. A 2. B 3. C 4. D1 5. D2	28	Jumlah peristiwa nikah menurut bulan	Simkah	Klasifikasi tempat nikah: 1. KUA 2. Luar KUA
21	Jumlah Kantor Urusan Agama menurut status dan kondisi bangunan	Sistem Elektronik dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi status tanah: 1. Sudah Bersertifikat 2. Belum Bersertifikat Klasifikasi kondisi bangunan:	29	Jumlah peristiwa rujuk menurut bulan	Simkah dan/atau Dokumen Administrasi	Klasifikasi bulan: 1. Januari 2. Februari 3. Maret 4. April 5. Mei 6. Juni 7. Juli 8. Agustus

			9. September 10. Oktober 11. November 12. Desember
30	Jumlah Bimbingan kepada keluarga menurut jenis	Dokumen Administrasi	Klasifikasi bulan: 1. Keluarga Sakinah 2. Keluarga Kristianis 3. Keluarga Bahagia 4. Keluarga Sukinah 5. Keluarga Hittasukhaya
31	Jumlah Lokasi, Luas, dan Status Tahanan Wakaf	Siwak	Luas dalam satuan m ² Klasifikasi satuan tanah: 1. Sudah Bersertifikat 2. Belum Bersertifikat
32	Jumlah tahanan wakaf menurut pemanfaatannya	Siwak	Klasifikasi pemanfaatan tanah wakaf: 1. Masjid 2. Mushalla 3. Sekolah 4. Pesantren 5. Makam 6. Sosial lainnya
33	Jumlah pemanfaatan tanah wakaf produktif menurut jenis usaha	Siwak	Klasifikasi pemanfaatan tanah wakaf produktif: 1. Perkebunan 2. Koperasi 3. Rumah Sakit 4. Rumah Sewa 5. Perikanan 6. Toko Sewa 7. Pertanian 8. SPBU 9. Perkantoran Sewa 10. Klinik 11. Peternakan
34	Jumlah kasus dan penyelesaian kasus konflik bernuansa	Dokumen Administrasi	

	agama		
35	Jumlah kasus dan penyelesaian kasus aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya yang mengatasnamakan agama	Dokumen Administrasi	
36	Jumlah kegiatan dialog intern umat beragama menurut agama	Dokumen Administrasi	Klasifikasi Agama: 1. Islam 2. Kristen 3. Katolik 4. Hindu 5. Budha 6. Konghucu
37	Jumlah Qari-Qariah dan Hafiz-Hafizah	Dokumen Administrasi	

Selain itu juga, pada tahap ini penulis membuat *flowchart* proses bisnis yang sedang berjalan untuk kemudian dikembangkan menjadi sistem yang baru dalam bentuk *use case diagram* dalam program *product backlog*, perancangan kebutuhan basis data serta perancangan *design interface* sistem.

d. *Sprint*

Selanjutnya penulis memaparkan *Executive Information System Data Kegamaan* yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan informasi data keagamaan dengan menunjukkan rancangan *user interface* sistem yang akan dibangun, menjelaskan alur kerja sistem, pemeliharaan sistem dan sebagainya. Penulis juga menjelaskan waktu pengerjaan yang dibutuhkan dalam membangun sistem informasi tersebut dan melakukan pendaftaran *domain* dengan laman <http://sidak-kemenaglampung.online> serta melakukan *hosting* agar sistem dapat diakses secara *online* [7].

e. *Working Increment Of The Software*

Working increment of the software merupakan tahapan pengembangan sistem sesuai dengan hasil *Sprint* (prototipe) [8]. Adapun agar perancangan sistem informasi dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan dapat digunakan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung maka melewati beberapa proses tahap pengerjaan yaitu sebagai berikut:

1. Scrum Meetings

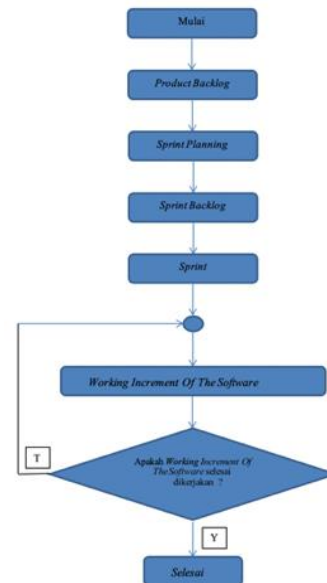
Scrum meeting merupakan pertemuan rutin yang dilakukan perminggu untuk mengevaluasi dan merevisi apa yang telah dikerjakan kepada pimpinan dalam perancangan *Executive Information System* Data Kegamaan, mencari solusi dari permasalahan yang menjadi hambatan dalam proses pengerjaan dan target penyelesaian untuk bahan meeting selanjutnya. Aktivitas *Scrum meeting* dilakukan secara rutin sesuai dengan kesepakatan waktu dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi selama penyelesaian rancang bangun dan implementasi *Executive Information System* Data Kegamaan ini.

2. Increment

Increment merupakan tahap pengembangan sistem lama menjadi terkomputerisasi dengan membangun sistem informasi penjadwalan dan pengolahan nilai berbasis website dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, *Java Script*, PHP dan CSS serta XAMPP untuk mengelola basis datanya. Setelah penulis menyelesaikan sistem tersebut, penulis menunjukkan hasil rancang bangun tersebut untuk diuji apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau diperlukan perbaikan kembali.

3. Demos

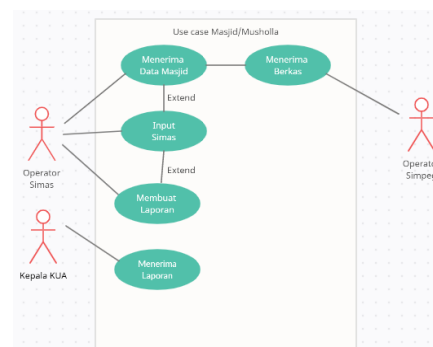
Demos merupakan aktifitas final dalam metode *Scrum Model* yaitu melakukan sosialisasi kepada pihak terkait dengan cara mendemonstrasikan penggunaan *Executive Information System* Data Kegamaan pada Pimpinan, Pejabat dan Pihak terkait yang membutuhkan. Adapun arsitektur kerangka kerja dengan scrum model dalam menyelesaikan penelitian ini digambarkan pada *flowchart* dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini.



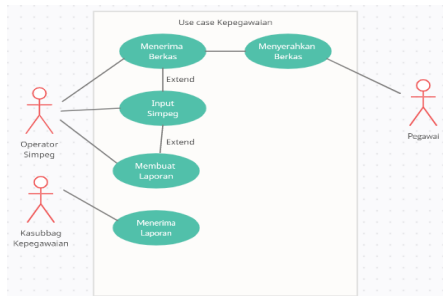
Gambar 1. Flow Chart

3.3 Analisa Sistem Yang Berjalan

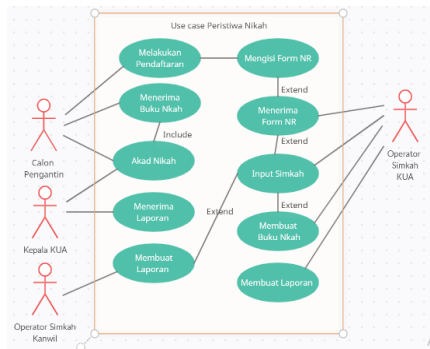
Analisis sistem merupakan gambaran tentang sistem yang saat ini sedang berjalan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Adapun sistem yang digunakan masih kurang efektif dan tidak efisien seperti yang telah diuraikan pada latar belakang masalah. Analisis sistem ini bertujuan untuk membuat sistem yang baru agar terkomputerisasi dengan sistem informasi berbasis *web* sehingga dapat menjadi efektif dan efisien. Yang mana analisa sistem yang berjalan dapat dilihat pada Gambar 2, Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 2. Use case Simkah



Gambar 3. Use case Simpeg



Gambar 4. Use case Simas

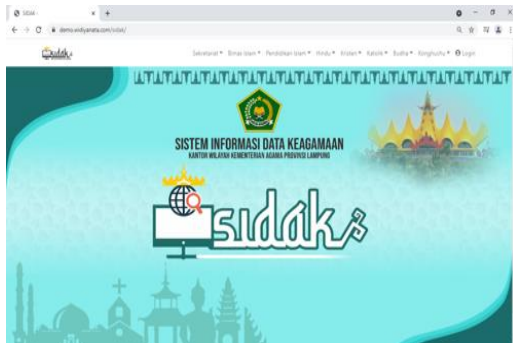
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Adapun dari hasil penelitian Rancang Bangun dan Implementasi *Executive Information System (EIS)* Berbasis Web Menggunakan *Scrum Model* pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung menghasilkan Sistem Informasi Data Keagamaan. Berikut ini *User Interface* dari sistem yaitu :

4.1.1 Halaman Muka

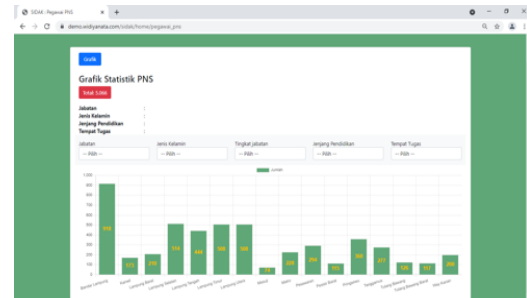
Berikut pada gambar 5 adalah tampilan Menu Utama SIDAK Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung seperti gambar 5.



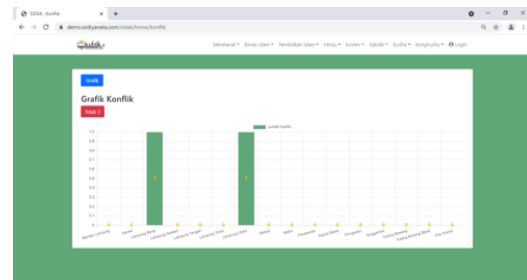
Gambar 5. Halaman Muka

4.1.2 Halaman Sub-Menu

Pada halaman sub menu terdiri dari Sub Umum dan Humas, Kepegawaian dan Hukum, Keuangan dan BMN, Perencanaan, Data dan Informasi, dan Ortala dan KUB. Setiap masing-masing sub menu terdapat laporan dari sub-sistem seperti yang dicontokan pada gambar 6 dan 7.



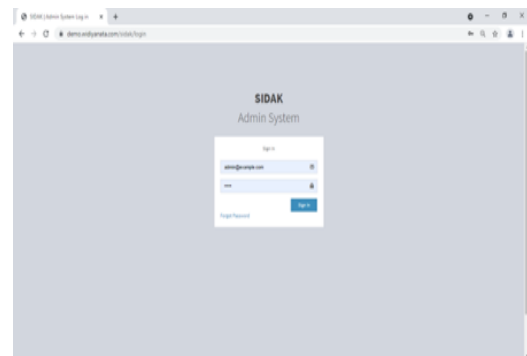
Gambar 6. Grafik Pegawai PNS



Gambar 7. Grafik Konflik Agama

4.1.2 Halaman Login

Menu *Bar Login* berfungsi untuk menginputkan data-data keagamaan. Adapun tampil *login* seperti gambar 8.

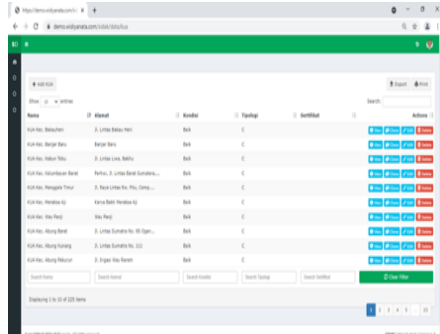


Gambar 8. Halaman Login

Input data dengan *login* admin akan menampilkan *input* data sebagai berikut:

A. Input Data KUA

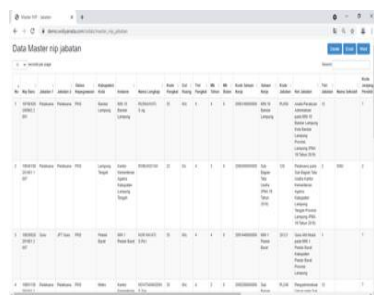
Pada *Input* data KUA admin dapat menambahkan data tentang kantor perwakilan KUA, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 9.



Gambar 9. *Input* Data KUA

B. Input Data PNS

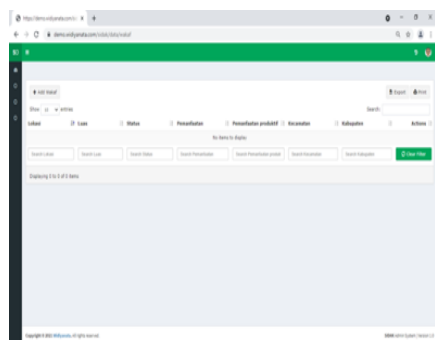
Pada *input* data PNS admin dapat menambahkan data tentang PNS Kementerian Agama. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. *Input* Data PNS

C. Input Data Tanah Wakaf

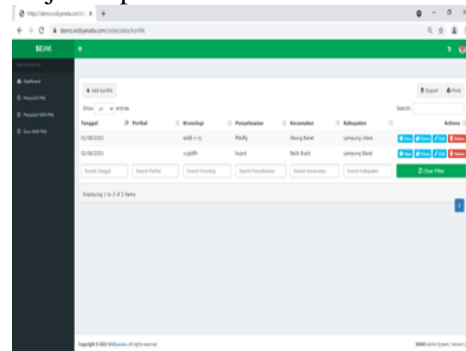
Pada *Input* data tanah wakaf, admin dapat menambahkan data tentang tanah umat yang diwakafkan, untuk kepentingan agama tertentu. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 11.



Gambar 11. *Input* Data Tanah Wakaf

D. Input Data Konflik Agama

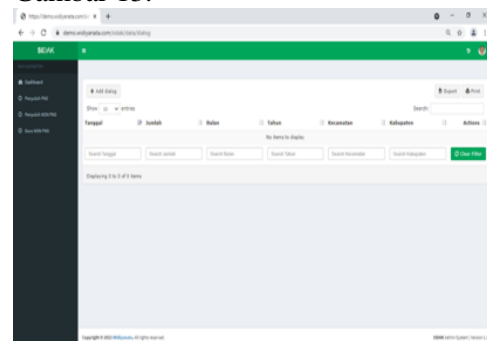
Pada *Input* data konflik, admin dapat menambahkan data tentang konflik agama yang terjadi. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 12.



Gambar 12. *Input* Data Konflik Agama

E. Input Data Dialog Keagamaan

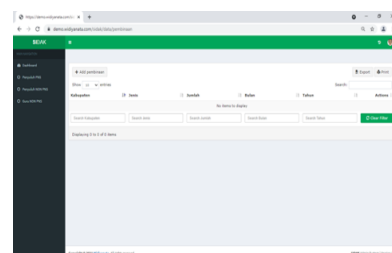
Pada *input* data dialog keagamaan, admin dapat menambahkan data dialog keagamaan. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 13.



Gambar 13. *Input* Data Dialog Keagamaan

F. Input Data Pembinaan Keluarga

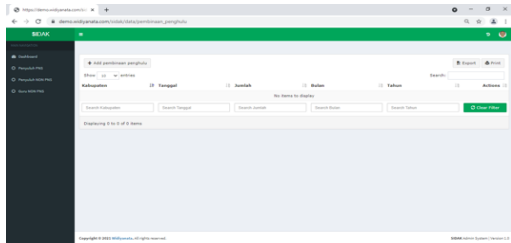
Pada *Input* data pembinaan keluarga semua agama admin dapat menginput di menu tersebut. seperti yang ditunjukkan pada Gambar 14.



Gambar 14. *Input* Data Pembinaan Keluarga

G. Input Data Pembinaan Penghulu

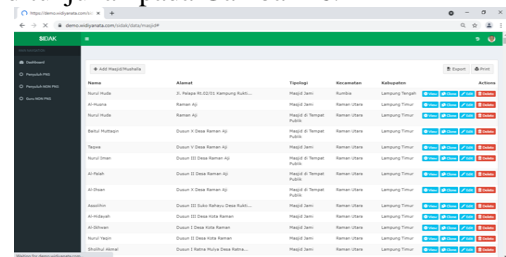
Pada *Input* data pembinaan penghulu, admin dapat menambahkan data penghulu. Seperti pada Gambar 15.



Gambar 15. *Input* Pembinaan Penghulu

G. Input Data Masjid/Mushalla

Pada *input* data masjid, admin dapat menambahkan data masjid, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 16.



Gambar 16. *Input* Data Masjid/Penghulu

4. KESIMPULAN

Sistem *executive system information* dengan metode *SCRUM* yang telah dibangun ini telah mencakup semua kebutuhan pada dinas kementerian agama, sehingga dapat membantu administrasi yang dibutuhkan pada institusi.

5. SARAN

Sistem *executive system information* ini dapat dikembangkan lagi dengan metode pengembangan sistem lain, untuk pembaharuan teknologi yang lebih baik. Serta sistem ini dapat dikembangkan ke aplikasi bergerak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga

artikel ilmiah ini dapat diterbitkan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh civitas Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya yang telah membantu penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Menteri Agama, *Peraturan Menag No. 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu Pada Kementerian Agama*. Indonesia: BN.2016/NO.2100,Peraturan.go.id, 2016, pp. 1–9. Accessed: Jul. 12, 2022. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/131101/peraturan-menag-no-65-tahun-2016>
- [2] Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, *Surat Edaran Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Agama*. Indonesia: <https://simpuh.kemenag.go.id/>, 2014, pp. 1–2. Accessed: Jul. 12, 2022. [Online]. Available: https://simpuh.kemenag.go.id/profil_regulasi.php?id=1768&action=detail1
- [3] Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, *Surat Edaran Tentang Pedoman Penyusunan dan Publikasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi*. Indonesia: <https://kemenag.go.id/>, 2020, pp. 1–2. Accessed: Jul. 12, 2022. [Online]. Available: <https://kemenag.go.id/archive/surat-edaran-sekretaris-jenderal-no-53-tentang-pedoman-penyusunan-dan-publikasi-statistik-kantor-wilayah-kementerian-agama-provinsi>
- [4] E. P. Wonohardjo, R. F. Sunaryo, Y. Sudiyono, N. Surantha, and Suharjito, “A Systematic Review of SCRUM in Software Development,” *JOIV: International Journal on Informatics Visualization*, vol. 3, no. 2, pp. 108–112, Mar. 2019, doi: 10.30630/JOIV.3.2.167.
- [5] D. Darmansyah, N. Apriani, and D. Apdian, “Pengembangan Sistem Informasi Dengan Menggunakan

-
- Metode Scrum : Systematic Review,” *Jurnal Teknik Komputer*, vol. 6, no. 2, pp. 163–168, Aug. 2020, doi: 10.31294/JTK.V6I2.7680.
- [6] C. E. Prastio and N. Ani, “Aplikasi Self Service Menu Menggunakan Metode Scrum Berbasis Android (Case Study: Warkobar Café Cikarang),” vol. 11, no. 2, 2018, [Online]. Available: <https://teknologi.id>,
- [7] Mgs. Afriyan Firdaus, Dwi RosaIndah, and Idris, “Penerapan Scrum Agile Development Dalam Pengembangan Sistem Informasi Monitoring Mahasiswa Bidikmisi Berbasis Web (Studi Kasus Di Universitas Sriwijaya),” *Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya (KNTIA)*, vol. 1, no. 1, pp. 31–36, Oct. 2016.
- [8] U. Bhayangkara Jaya, “Pemanfaatan Metode Agile Scrum dengan tools Quire dalam menyusun Kurikulum MBKM di masa Covid-19 R Wisnu Prio Pamungkas.”